KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dukung program unggulan prabowo, komisi V DPR minta bedag rumah dipercepat
Tanggal : Selasa, 14 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dukung Program Unggulan Prabowo

Komisi V DPR Minta Bedah Rumah Dipercepat

SENAYAN mendorong percepatan realisasi program bedah rumah yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi tahun 2026 jumlah rumah yang akan dibedah menjadi 400 ribu unit, naik signifikan dari tahun 2025 sebanyak 45 ribu unit.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, program bedah rumah ini menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil. Program tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat yang membutuhkan.

"Target renovasi 400 ribu rumah rakyat pada 2026 menunjukkan arah kebijakan perumahan nasional memberi perhatian lebih besar pada kualitas hunian yang sudah ditempati masyarakat," ujar Iwan di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, target program bedah rumah pada 2026 meningkat menjadi 400 ribu unit. "Dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat, satu di antaranya langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat," ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (6/4/2026).

Program bedah rumah ini bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan menyasar masyarakat kategori miskin. Dalam program ini, masyarakat yang berhak mendapat bantuan sebesar Rp 20 juta per rumah. Rinciannya, Rp 17,5 juta bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Iwan menegaskan, BSPS yang menargetkan 400 ribu unit rumah pada tahun ini merupakan program penting yang dibutuhkan rakyat. Program ini juga sangat baik karena bertujuan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. "Ini bukti keberpihakan Pemerintahan Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat," tandas politikus Gerindra ini.

Dia menambahkan, program bedah rumah merupakan langkah penting yang dilakukan Pemerintah Prabowo. Karena dalam


FOTO: DPR.GO.ID
Andi Iwan

banyak wilayah, persoalan utama perumahan justru bukan ketiadaan rumah, tapi kondisi rumah yang secara struktural tidak lagi memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kelayakan hidup.

Selain peningkatan jumlah unit, cakupan program bedah rumah di tahun 2026 akan diperluas secara nasional. Karena itu, gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo dengan meningkatkan secara signifikan jumlah rumah yang akan direnovasi, harus dibarengi dengan implementasi yang baik di lapangan.

Diketahui, pada tahun 2025 terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun ini Pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.

Dia mengingatkan Kementerian PKP sebagai pelaksana program untuk memetakan penerima manfaat dengan maksimal. Artinya, ketepatan membaca rumah mana yang paling membutuhkan intervensi sangat penting dilakukan. "Selain berpijak pada kesesuaian data dan laporan dari Pemda, penting juga memastikan dengan kondisi di lapangan," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Untuk itu, Iwan mendorong agar proses verifikasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena dalam banyak kasus pemberian bantuan sosial, sering ditemukan adanya ketidakakuratan data, sehingga masyarakat yang berhak justru tidak menjadi penerima manfaat.

Anggota Komisi V DPR Erna Sari Dewi menambahkan, program bedah rumah akan digulirkan secara masif dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Program ini akan digelar secara merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. "Kita ingin dampaknya tidak hanya sesaat, tetapi berkelanjutan," kata Erna dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Erna menegaskan, pengawasan pelaksanaan program ini menjadi aspek penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. "Kami mendorong adanya koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemda, serta pihak terkait lainnya," imbau politikus Partai Nasdem ini.

Sebagai informasi, program bedah rumah menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Program ini dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan landasan hukum Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. ■ TIF